

DAFTAR PUSTAKA

- Bustam, 2008, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Dimiyati, Khuzalifah. & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fuady, Munir. 2003, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Boedi. 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1. Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan.
- Indonesian Institute for Conflict Transformation, 2006, *Pelatihan Mediator*, Jakarta: IICT.
- Kartasapoetra, G. dkk, 1991, *Hukum Tanah, Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Lovenheim, 1999, *Negoisasi dan Mediasi*, Jakarta: Elips.
- Margono, Suyud. 2004, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Murad, Rusmadi. 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Almuni.
- Muttaqin, Andi. 2008, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kragilan Kecamatan Kadipiro Oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Jogjakarta: Tugujogja Pustaka.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas.
- Tauchid, Mochammad. 2009, *Masalah Agraria, Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press.

Tim KKBI, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Widjaja, Gunawan. 2004, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berkah atau Kuasanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN Dan Kantor Pertanahan.

PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.